

Judul Penelitian : Kebijakan Alokasi Pembiayaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat.

Ketua Penelitian : Drs. Falih Suaedi

Anggota Peneliti : -

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Sumber Biaya : DIP Operasional Perawatan dan Fasilitas Universitas Airlangga tahun 1990/1991
S.K. Rektor Nomor: 7744/PTO3.H/N/1990
Tanggal 24 September 1990

Pembangunan Nasional --yang pada dasarnya dilakukan di Daerah dapat dilakukan atau menggunakan jalur Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah walaupun tujuannya sama yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang ditangani Pusat identik dengan produk pembangunan sektoral sementara yang ditangani Daerah identik dengan produk pembangunan regional. Dari sini mulai timbul jalur-jalur hubungan antara keduanya sehingga masalah yang sering mengedepan dapat bermula dari adanya pembagian fungsi antara unit-unit pemerintah tersebut di dalam penyediaan pelayanan masyarakat. Baik Pusat maupun Daerah mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu mengarahkan alokasi sumberdaya secara efisien dan efektif sesuai dengan tujuan yang akan dicapai (the best location of resources) dan distribusi hasil pembangunan yang adil (equitable distribution). Dalam hal ini Pusat menduduki posisi yang lebih kuat dibanding Daerah, terutama dari segi politik dan finansial. Superioritas Pusat dalam bidang finansial terlihat fleksi pada SDO (subsidi daerah otonom), data menunjukkan bahwa selama Pelita IV rata-rata Penerimaan Dati I di Indonesia sebesar 84,6 % nya berasal dari SDO. Ketergantungan yang begitu besar tersebut akan mempengaruhi pula pola hubungan Pusat-Daerah. Artinya Pusat akan mengendalikan dan mendominasi serta mendominasi prior atas Daerah terutama dalam Kebijakan alokasi pembiayaannya. Dan hal tersebut dapat diamati dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah khususnya sektor-sektor dalam pengeluaran pembangunan sebab pada esensinya --dengan memperhatikan skala prioritas yang ada dalam pengeluaran pembangunan-- kebijakan alokasi pembiayaan suatu daerah ada disitu.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran perkembangan kebijakan alokasi pembiayaan beserta pelaksanaannya selama ini. Secara khusus akan berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut : 1. ingin mengetahui pola dan arah kebijakan alokasi pembiayaan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur. 2. ingin mengetahui skala prioritas dari kebijakan tersebut. 3. ingin mengetahui pergeseran pola dan arah kebijakan tersebut --bila ada-- Penelitian ini bersifat deskriptif artinya diarahkan untuk memberi gambaran atas obyek yang diteliti serta lebih banyak di

kan untuk menemukan data-data awal dari permasalahan yang ditentukan. Berkenaan dengan hal tersebut maka tidak munculnya suatu hipotesis untuk diuji kebenarannya merupakan sesuatu yang wajar. Namun dalam pembahasannya akan ditemui analisis-analisis yang lebih banyak bersifat kualitatif-interpretatif. Dengan demikian tidak dapat dielakkan bahwa data yang diperoleh akan diinterpretasikan secara kualitatif dengan menggunakan pemahaman yang bersifat logis teoritis. Sementara teknik pengumpulan data akan lebih banyak didominasi dengan cara menelusuri informasi melalui dokumen-dokumen resmi atau data-data sekunder resmi yang kemudian didayagunakan untuk memberi jawab atas permasalahan yang dibahas. Teknis analisis data akan lebih banyak memunculkan upaya-upaya sedemikian rupa sehingga data yang diperoleh lebih banyak berupa persentase-persentase dan perbandingan-perbandingan agar mampu untuk menjawab permasalahan serta boleh jadi data tersebut merupakan hasil olahan peneliti agar mendapatkan data dan hasil analisis yang memadai.

Hasil temuan data beserta analisisnya menunjukkan bahwa daerah tingkat I Jawa Timur pada kurun waktu kurang lebih lima tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang cukup baik dalam hal memperbaiki struktur penerimaannya artinya pendapatan asli daerah naik 54,21 % sementara bantuan Pusat --Rutin dan Pembantuan-- mencapai 34,88%. Namun apabila dihubungkan dengan total penerimaan penerimaan daerah maka bantuan Pusat mencapai 72,63% --pada tahun 1989/90-- dan 82,51% pada tahun 1984/85. Dominasi Pengeluaran Rutin untuk lima tahun terakhir ini masih dominan yaitu mencapai 85,61% pada tahun 1989/90. Disamping itu terjadi pula pergeseran dalam skala prioritas atas berbagai sektor pembangunan pada pengeluaran pembangunan, terutama untuk tahun anggaran 1988/89 - 1989/90. Dati I Jawa Timur menempatkan skala prioritas utama pada lima sektor yaitu aparatur pemerintah, pembangunan daerah, pertanian dan pengairan, perhubungan dan pariwisata, pendidikan dan generasi muda. Oleh sebab itu dipandang perlu bagi dati I Jatim untuk memperkuat pendapatan asli daerah karena hal itu dipandang pula sebagai langkah yang paling strategis untuk mewujudkan otonomi daerah. Merubah dan memperbaiki struktur pengeluaran menuju keseimbangan antara pengeluaran rutin dan pembangunan. Dalam keadaan yang selalu minim, pengeluaran pembangunan harus dikelola secara profesional artinya sesuai dengan kondisi, potensi dan prospeknya bagi daerah serta meminimalkan pengaruh Pusat atas pola yang sebenarnya sesuai dengan kondisi Daerah.